

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM						Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
HUKUM PEMERINTAHAN DESA			2	1	Agustus 2022	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
					K. Wisnu Wardhana,S.H.,M.H.	
	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
		<ol style="list-style-type: none"> Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan deskripsi mata kuliah Ilmu Negara Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan ilmu negara dari masa ke masa Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang seluk beluk negara Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dan perkembangan ilmu negara Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ilmu negara khusus khusus Republik Indonesia Mahasiswa dapat menganalisis perkembangan terbaru dan problematika kenegaraan secara internasional maupun nasional 				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mendeskripsikan landasan yuridis pemerintahan daerah dan desa				
	Sub-CPMK2	Mengidentifikasi pemerintahan daerah dan desa dalam peraturan perundang undangan				
	Sub-CPMK3	Menganalisis Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah				
	Sub-CPMK4	Mengidentifikasi hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya				

	Sub-CPMK5	Menganalisis pembentukan daerah, desa dan kawasan khusus							
	Sub-CPMK6	Mengidentifikasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa							
	Sub-CPMK7	Mengidentifikasi dan menganalisis pemilihan kepala daerah dan kepala desa							
	Sub-CPMK8	Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan daerah dan peraturan desa.							
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK								
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8
	CPL1	V		V	V			V	V
	CPL2	V	V	V	V	V	V	V	V
	CPL3	V		V	V	V	V	V	V
	CPL4	V	V	V	V	V	V	V	V
	CPL5	V	V	V	V	V	V	V	V
	Dst								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dan konsep dasar tentang pemerintahan desa								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi mata kuliah pemerintahan desa 2. Perkembangan pemerintahan desa dari masa ke masa 3. Definisi pemerintahan desa 4. Konsep pemerintahan desa 5. Hubungan pemerintah daerah dan pemerintahan desa 								
Pustaka	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009 2. Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 3. Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003 4. HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 5. Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 6. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 7. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993 8. R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001 							

		<p>9. Sadu Wasistiono, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003</p> <p>10. Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981</p>					
		<p>Pendukung :</p>					
		<p>1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen 1 – 4)</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</p> <p>4. Daerah</p> <p>5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007</p>					
Dosen Pengampu							
Mata Kuliah syarat		-					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Mahasiswa memiliki adab dan tata krama yang baik selama kegiatan belajar mengajar	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	1. kontrak kuliah 2. penyampaian silabus/RPS dan RPP	5
2	Mahasiswa mampu memahami konsep otonomi daerah, otonomi desa,	Mahasiswa mampu mendeskripsika	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	1. Mengidentifikasi landasan yuridis pemerintahan	5

	prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	n konsep otonomi daerah, otonomi desa, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa				daerah dan pemerintahan desa 2. Menganalisis konsep otonomi daerah dan otonomi desa 3. Kerja kelompok menganalisis prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	
3	Mahasiswa mampu memahami pelaksanaan otonomi daerah dan desa era orde lama dan orde baru, serta pelaksanaan otonomi daerah pada orde reformasi	Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah dan desa era orde lama dan orde baru, serta pelaksanaan otonomi daerah pada orde reformasi	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	Diskusi kelompok menganalisis otonomi daerah dan desa orde lama, orde baru dan orde reformasi	5
4	Mahasiswa mampu memahami konsep kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa) dalam NKRI dan mampu mengidentifikasi pembagian urusan pemerintahan pusat	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan kewenangan pemerintah pusat dan	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	Diskusi kelompok mengidentifikasi pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (desa) di Classroom Google atau Edmodo	5

	dan pemerintahan daerah (desa)	pemerintah daerah (desa) dalam NKRI dan mampu mengidentifikasi pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (desa)					
5	mahasiswa mampu memahami pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa 2. Diskusi kelompok pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa 	5
6	mahasiswa mampu memahami konsep hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dan pelaksanaan	Mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait hubungan antara	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	Diskusi kelompok menganalisis pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	10

	hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)	pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)				(provinsi, kabupaten/kota, dan desa)	
7	Mahasiswa mampu memahami menganalisis pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota, dan desa) dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota,	Ketepatan dan penguasaan materi	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	1.Diskusi kelompok menganalisis pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) 2.Diskusi kelompok menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya	5

		dan desa) dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)				lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Mahasiswa mampu memahami dasar pemikiran pembentukan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan syarat-syarat dan mekanisme pembentukan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan Menelaah dasar pemikiran pembentukan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan menelaah syarat-syarat dan mekanisme pembentukan pemerintah daerah dan	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog menelaah dasar pemikiran pembentukan pemerintah daerah dan pemerintah desa 2. Diskusi kelompok menelaah syarat-syarat dan mekanisme pembentukan pemerintah daerah dan pemerintah desa 	10

		pemerintah desa					
10	Mahasiswa mampu memahami maksud penghapusan dan penggabungan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan pembentukan kawasan khusus	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan dan menganalisis penghapusan dan penggabungan pemerintah daerah dan pemerintah desa dan pembentukan kawasan khusus	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan diskusi	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis penghapusan dan penggabungan pemerintah daerah dan pemerintah desa 2. Diskusi kelompok untuk menganalisis pembentukan kawasan khusus 	5
11	Mahasiswa mampu memahami azas-azas penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah.	Mahasiswa mampu menelaah azas-azas penyelenggaraan pemerintahan, Mengidentifikasi hak dan kewajiban pemerintah daerah dan mampu menganalisis pelaksanaan	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, dan diskusi	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog tentang azas-azas penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Diskusi hak dan kewajiban serta pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah. 	5

		hak dan kewajiban pemerintah daerah					
12	Mahasiswa mampu memahami kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa)	Mahasiswa mampu menganalisis kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa)	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. diskusi dan tanya jawab terkait kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa)	10
13	Menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan kepala desa (Pilkades)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan kepala desa (Pilkades)	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	Diskusi mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan kepala desa (Pilkades)	10
15	Mahasiswa mampu memahami pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan penyelesaian	Mahasiswa membuat analisa dan pendapat terkait	Membuat analisis terkait materi yang telah disampaikan dan menguasainya	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	Diskusi dan tanya jawab terkait isu perkembangan terbaru dalam hal pelaksanaan	10

	sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades)	pelaksanaan pemilihan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades)				pemilihan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades)	
	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis peraturan di daerah dan di desa, mampu memahami mekanisme pembentukan peraturan di daerah dan di desa dan mampu memahami pelaksanaan pembentukan produk hukum di daerah dan di desa	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis peraturan di daerah dan di desa, mampu menganalisa mekanisme pembentukan peraturan di daerah dan di desa dan mampu mendeskripsikan pelaksanaan pembentukan produk hukum di daerah dan di desa	Membuat analisis terkait materi yang telah disampaikan dan menguasainya	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	Diskusi dan tanya jawab jenis-jenis peraturan di daerah dan di desa, mampu memahami mekanisme pembentukan peraturan di daerah dan di desa dan mampu memahami pelaksanaan pembentukan produk hukum di daerah dan di desa	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.